

# PERSEPSI *USER* TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI EMPIRIS DI EKS KARISIDENAN SURAKARTA)

**Jaka Winarna dan Sri Murni**

Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Sebelas Maret Surakarta

## ***Abstract***

*The purpose of this study is to examine the perception difference among user to the local government annual report.*

*The sample of this study were citizens, DPR and BAWASDA, and investor (big companies) that located in region Surakarta that is consist seven city and regency (Surakarta, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Klaten, Sragen, Boyolali). Sample that used in this study was 281 respondents. Instrument that used in this study is questionnaire, where have been tested validity and reliability. This research also use normality test and the result indicated that data have been used is in normal distribution. For hypothesis test, this research using Kruskal Wallis.*

*Null hypothesis in this research is there is difference in the perception of user to the local government annual report.*

*The result of this research faound that there's difference among user to the local government annual reports. The Kruskal Wallis tests show the result of 0,000. The result indicated that null hypothesis is not accepted and the conclusion have been taken that there is no different perception of user local government annual report in region Surakarta.*

***Keywords:*** *perception, users, Local Governmental Annual Reports*

## **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji perbedaan persepsi diantara antara pengguna terhadap laporan tahunan pemerintah daerah.

Sampel dalam penelitian ini adalah warganegara, DPR dan BAWASDA, dan investor (perusahaan-perusahaan besar) yang berada di wilayah Surakarta yang terdiri atas tujuh kota dan kabupaten (Surakarta, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Klaten, Sragen, Boyolali). Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 281 responden. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket, yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Penelitian juga menggunakan uji normalitas dan hasilnya mengindikasikan bahwa data telah digunakan dalam distribusi normal. Untuk pengujian hipotesis, penelitian ini menggunakan Kruskal Wallis. Hipotesis null pada penelitian ini adalah terdapat perbedaan dalam persepsi pengguna terhadap laporan tahunan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan dikalangan pengguna terhadap laporan tahunan pemerintah daerah. Uji Kruskal Wallis menunjukkan hasil sebesar 0.000. Hasilnya mengindikasikan bahwa hipotesis null tidak diterima dan kesimpulan telah diambil bahwa tidak ada perbedaan persepsi dikalangan pengguna mengenai laporan tahunan pemerintah daerah di wilayah Surakarta.

**Kata kunci:** persepsi, pengguna, Laporan Tahunan Pemerintah Daerah

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Dalam era otonomi daerah seperti saat ini, salah satu aspek yang harus diperhatikan dengan seksama adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Keuangan daerah merupakan dokumen publik yang berhak diketahui oleh masyarakat. Pemerintah Daerah wajib mempublikasikan setiap laporan keuangan daerah ke masyarakat. Empat laporan keuangan yang wajib dipublikasikan adalah laporan realisasi APBD, neraca, aliran kas, dan catatan atas laporan keuangan. Anggaran daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah, yang mempunyai posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pelaksanaan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk mencapainya, anggaran daerah harus diorientasikan pada kepentingan masyarakat (*client centered*), yang menuntut transparansi informasi anggaran kepada publik atau masyarakat (Kumorotomo & Erwan, 2005).

Akuntabilitas dan transparansi keuangan negara merupakan tujuan penting dari reformasi sektor publik mengingat secara definitif kualitas pemerintahan yang baik (*good governance*) ditentukan oleh kedua hal tersebut ditambah dengan peran serta masyarakat dan reformasi hukum. Transparansi atas aktivitas pengelolaan keuangan negara kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi sangat diperlukan (Mardiasmo, 2004). Informasi keuangan untuk pihak luar diwujudkan dalam seperangkat laporan keuangan daerah resmi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemerintah daerah harus menyusun laporan keuangan umum untuk pihak eksternal. Pihak eksternal biasanya tidak terlibat secara langsung dalam proses penyusunan laporan keuangan dan hanya menerima laporan keuangan akhir. Dengan demikian, laporan keuangan tersebut dianggap menjadi satu-satunya informasi yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dan untuk dasar pengambilan keputusan investasi. Keputusan akan tepat apabila informasi keuangan tersebut benar dan ditangkap oleh pihak luar secara benar pula. Hal ini dimungkinkan kalau laporan keuangan disusun dengan cara tertentu, yang berarti bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan pedoman yang telah disepakati dan dipahami bersama (Suwardjono, 2002).

Pemakai laporan keuangan (*users of accounting information*) perlu menjadi pertimbangan penyusun standar akuntansi. Dengan mengetahui siapa dan bagaimana kedudukan yang dituju terhadap organisasi atau badan usaha, maka *users of accounting information* menjadi pertimbangan penting apakah suatu informasi harus disediakan dalam pelaporan keuangan (Suwardjono, 2005). Setelah mengetahui siapa yang akan

dituju, maka pertimbangan selanjutnya adalah apakah informasi yang disajikan tersebut dapat dipahami oleh pemakai.

Keterpahaman (*understandability*) adalah kemampuan suatu informasi untuk dicerna maknanya oleh pemakai (Suwardjono, 2005). Faktor yang mempengaruhi *understandability* adalah pemakai dan informasi atau pesan yang disampaikan. Informasi yang disampaikan pemerintah kepada *stakeholder* (pemakai) berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat pemerintah daerah dapat bermanfaat ketika informasi yang disajikan merupakan informasi yang tepat dan pemakai dapat memahami informasi yang terkandung di dalamnya. *Stakeholder* pemakai laporan keuangan pemerintah daerah harus memahami karakteristik laporan keuangan pemerintah daerah sehingga dapat menggunakan informasi akuntansi tersebut sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan atau keputusan. Untuk dapat memahami karakteristik laporan keuangan tersebut pemakai dapat mempelajari karakteristik laporan keuangan. Betapapun bagusnya penyajian laporan keuangan, laporan keuangan tersebut tidak akan bermanfaat apabila pemakai tidak mengetahui manfaatnya sehingga laporan keuangan yang sebenarnya bermanfaat menjadi tidak terpakai karena pemakai tidak memahami dan tidak bersedia belajar cara memahaminya.

Untuk memperoleh kesepahaman antara penyaji dan pemakai laporan keuangan pemerintahan, maka pemerintah menyusun suatu standar akuntansi pemerintahan sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah. Standar tersebut dijadikan sebagai pedoman penyajian laporan keuangan kepada pihak di luar organisasi agar laporan tersebut lebih berguna, dapat dimengerti dan diperbandingkan, serta tidak menyesatkan.

Pemerintah melalui presiden telah menetapkan Keputusan Presiden No. 84 tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden No. 2 Tahun 2005. Keputusan inilah yang kemudian dijadikan dasar ditetapkannya PP No. 24 Tahun 2005 yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lebih lanjut, PP No. 24 Tahun 2005 berisi pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintahan pusat/daerah dan merupakan standar bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi akuntansi di pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan menurut peraturan pemerintah ini adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintahan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan informasi yang dihasilkan oleh proses akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah (Halim, 2007). *Governmental Accounting Standards Board* atau GASB (1999) dalam Mardiasmo (2002) mengidentifikasikan pihak eksternal sebagai pemakai laporan keuangan pemerintah dalam tiga kelompok besar, yaitu masyarakat, legislatif dan badan

pengawas yang secara langsung mewakili rakyat, dan juga investor dan kreditor yang berpartisipasi dalam proses pemberian pinjaman. Masyarakat pengguna layanan publik dapat diwakili oleh lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, pengamat ekonomi sebagai pihak yang membutuhkan informasi atas biaya, harga, kualitas pelayanan yang diberikan, serta sebagai pemonitor kinerja pemerintah daerah. Legislatif dan badan pengawas memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi dan penyelewengan keuangan negara. Investor dan kreditor sebagai sumber penyedia keuangan organisasi membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat risiko, likuiditas dan solvabilitas.

Menurut mantan Ketua BPK, Anwar Nasution, 99% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2006 belum sesuai standar. Dari 362 LKPD pemerintah daerah yang diperiksa, BPK memberi opini wajar dengan pengecualian kepada sebanyak 284 LKPD, opini wajar tanpa pengecualian kepada 3 LKPD, tidak wajar kepada 19 LKPD, dan tidak menyatakan pendapat (*disclaimer*) kepada 56 LKPD. (Republika, 11 Oktober 2007). Dengan tidak tertibnya laporan keuangan daerah menurut SAP, BPK berkesimpulan pemerintah daerah masih belum siap menerapkan Paket UU Keuangan Negara.

Pernyataan BPK sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwijayanti (2007) mengenai evaluasi implementasi SAP pada laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2006, studi kasus pada Pemerintahan Kabupaten Temanggung. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2006 Kabupaten Temanggung belum sepenuhnya sesuai dengan SAP karena penyusunan anggarannya masih menggunakan pedoman dari Kepmendagri No. 29 Tahun 2002.

Data yang diperoleh dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) pada semester II/2007 menyebutkan bahwa 27,8% pemerintah daerah belum tertib dalam mengelola dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Ketua BPK, Anwar Nasution, menyebutkan bahwa dari 97 LKPD, BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian terhadap 44 LKPD, *disclaimer* untuk 44 LKPD, dan tidak wajar untuk sembilan LKPD. Menurut BPK, tidak dipenuhinya batas waktu penyusunan dan penyampaiannya ke BPK untuk diperiksa disebabkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyusun LKPD sangat terbatas, antara lain karena sistemnya belum terbentuk, tenaga pembukuan dan akuntan di pemerintah daerah sangat terbatas, serta sistem komputer yang masih belum sinkron (Antaraneews: 2008).

Mulai Januari 2008, pemerintah daerah diwajibkan untuk mempublikasikan setiap laporan keuangan ke masyarakat (Suara Merdeka: 2004). Penyusunan laporan keuangan yang dipublikasikan tersebut harus disesuaikan dengan SAP. Dari kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mewajibkan publikasi laporan keuangan kepada masyarakat, diharapkan dapat dijadikan media akuntabilitas dan transparansi pemerintah kepada masyarakat. Laporan keuangan pemerintah walaupun tidak mengungkapkan entitas pemerintah secara keseluruhan, tetapi tetap menjadi sarana utama akuntabilitas (Boyne and Law, 1991; Ryan et al., 2000; Taylor and Rosair, 2000; Coy et al., 2001; Mack et al., 2001

dalam Steccolini, 2002). Penelitian mengenai laporan keuangan pemerintah yang dapat digunakan sebagai media akuntabilitas telah dilakukan oleh Steccolini (2002). Hasil penelitiannya dikonfirmasi menggunakan persepsi *user*. Hasil penelitian tersebut adalah anggota parlemen, eksekutif, dan pemerintahan yang lebih tinggi lebih tertarik untuk membaca dan mempelajari laporan keuangan dibandingkan dengan masyarakat. Persepsi yang timbul diantara *user* laporan keuangan ternyata berbeda.

Di Indonesia penelitian mengenai persepsi *user* terhadap laporan keuangan pemerintah daerah masih jarang dilakukan. Hal tersebut yang memotivasi peneliti untuk menguji apakah terdapat perbedaan persepsi antara masyarakat, legislatif dan badan pengawas, serta investor dan kreditor mengenai laporan keuangan pemerintah daerah. Alasan lain dilakukannya penelitian ini adalah adanya data dari BPK bahwa terjadi peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam penyajian laporan keuangan. Pada penyajian LKPD tahun 2006 sebanyak 99% laporan LKPD disajikan tidak sesuai standar dan pada semester II/2007 jumlah LKPD yang tidak sesuai standar turun menjadi 27,8%. Pemerintah daerah sebagai penyusun LKPD mulai berusaha menerapkan SAP yang telah ditetapkan pemerintah. Peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi *user* terhadap laporan keuangan pemerintah daerah setelah ditetapkannya SAP.

## **2. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah yang akan disampaikan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana persepsi *user* terhadap laporan keuangan pemerintah daerah?
- b. Apakah terdapat perbedaan persepsi diantara *user* terhadap laporan keuangan pemerintah daerah?

## **3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui persepsi *user* terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
- b. Untuk menguji secara empiris apakah terdapat perbedaan persepsi di antara *user* terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

## **4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dalam menyempurnakan penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan di masa yang akan datang dan dapat mengetahui seberapa besar tingkat pemahaman para pemakai laporan keuangan pemerintah daerah.
- b. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi untuk mengetahui apakah laporan keuangan yang mereka hasilkan dapat dipahami oleh pemakai laporan keuangan.
- c. Bagi Akademisi, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap literatur penelitian akuntansi khususnya tentang akuntansi sektor publik, khususnya laporan keuangan pemerintah daerah.

## METODE PENELITIAN

### 1. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Penelitian ini merupakan penelitian *survey* pada pemakai laporan keuangan di wilayah eks Karesidenan Surakarta. Populasi yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah pemakai laporan keuangan daerah menurut GASB.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* yaitu dengan metode *purposive sampling*, Sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan kriteria menurut GASB dan diasumsikan bahwa pemakai laporan keuangan mengetahui laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu:

#### a. Masyarakat

Masyarakat yang dianggap mengetahui, pernah mendapat materi dan berkepentingan terhadap laporan keuangan daerah diwakili oleh mahasiswa jurusan akuntansi yang pernah menempuh mata kuliah akuntansi sektor publik, akuntan pendidik yang merupakan dosen jurusan akuntansi yang mempunyai kompetensi dalam akuntansi sektor publik, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan dan terlibat dalam advokasi APBD dan memberikan aspirasi dalam penyusunan arah dan kebijakan APBD di wilayah eks Karesidenan Surakarta.

#### b. Legislatif dan Dewan Pengawas

Anggota DPRD wilayah eks Karesidenan Surakarta yang berasal dari Komisi yang membawahi bidang keuangan. Badan Pengawas yang meliputi Badan Pengawas Daerah di wilayah eks Karesidenan Surakarta.

#### c. Investor

Investor adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan masing-masing pemerintah daerah dalam proyek yang diadakan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota.

Tipe desain pengambilan sampel dari populasi adalah sebagai berikut ini. Untuk masyarakat yang diwakili oleh kelompok mahasiswa jurusan akuntansi peneliti secara *convenience* memilih beberapa perguruan tinggi di Surakarta, masing-masing 20-30 kuesioner. Untuk responden akuntan pendidik, peneliti secara *convenience* memilih responden sebanyak 5-10 orang tiap universitas. Peneliti secara random memilih 14 Lembaga Swadaya Masyarakat di wilayah eks Karesidenan Surakarta. Di tiap- tiap LSM kuesioner yang akan diberikan sebanyak 3-5 buah.

Untuk anggota DPRD, sampel diambil dari populasi anggota DPRD yang berada di wilayah eks Karesidenan Surakarta. Peneliti memilih 5-7 anggota DPRD sebagai responden di tiap-tiap kota/kabupaten. Sedangkan sampel Badan Pengawas Daerah, peneliti mengirim 5-15 kuesioner ke masing-masing Kantor Badan Pengawas Daerah di tujuh kabupaten/kota wilayah eks Karesidenan Surakarta.

Investor yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan masing-masing pemerintah daerah dalam proyek yang diadakan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah *field research* atau studi lapangan, yaitu penelitian secara langsung membagikan kuesioner kepada responden yang dianggap memenuhi syarat dan dapat memberi informasi yang cukup. Sumber data yang digunakan yaitu: data primer dan data sekunder.

## 3. Variabel dan Pengukuran Variabel

Variabel dalam penelitian ini adalah persepsi terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Persepsi terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dioperasionalkan sebagai tingkat pemahaman terhadap konsep laporan keuangan daerah. Pemahaman terhadap konsep laporan keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan tingkat pemahaman pemakai terhadap pengertian unsur-unsur laporan keuangan pemerintah daerah. Apabila hasil skor kuesioner menunjukkan rata-rata skor responden rendah, maka pemakai belum paham mengenai konsep laporan keuangan pemerintah daerah.

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Kuesioner yang diberikan kepada responden terdiri dari tiga bagian, yaitu: Bagian I berisi tentang pertanyaan tentang data pribadi responden. Bagian II (pertanyaan umum) berisi 8 pertanyaan, pertanyaan 1 sampai 4 mengenai pengetahuan responden seputar laporan keuangan pemerintah daerah, pertanyaan 5 dan 6 mengenai publikasi laporan keuangan, serta pertanyaan 7 dan 8 mengenai fungsi laporan sebagai media transparansi dan akuntabilitas. Bagian III berisi 35 pertanyaan mengenai konsep laporan keuangan daerah dan komponen laporan keuangan (neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan).

Dalam bagian II, peneliti memakai skala nominal yang berbentuk pernyataan ya atau tidak atau pernah dan belum pernah. Sedangkan Instrumen bagian III, peneliti memakai pernyataan positif dan negatif yang berbentuk tanggapan dengan menggunakan skor skala likert lima poin, yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). Rentang nilai untuk mengukur jawaban di dalam kuesioner mengenai pemahaman terhadap laporan keuangan pemerintah daerah adalah nilai 1 untuk jawaban sangat tidak setuju sampai dengan nilai 5 untuk jawaban sangat setuju.

## 4. Metode Analisis Data

### a. Uji Kualitas Data

Untuk uji validitas akan menggunakan *uji Pearson Corelation*. Uji realibilitas menggunakan metode *Cronbach-Alpha* (Sekaran, 2006). Sedangkan uji normalitas dilakukan menggunakan *Uji One Sampel Kolmogorov Smirnov*. Selanjutnya, hasil pengujian normalitas akan digunakan untuk menentukan alat uji hipotesis.

### b. Uji Hipotesis

Penelitian ini berusaha untuk menguji perbedaan persepsi *user* terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Apabila hasil dari uji normalitas menunjukkan

bahwa data terdistribusi normal, maka uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan statistik parametrik yaitu analisis varian (*one way ANOVA*). Apabila uji normalitas menunjukkan data tidak terdistribusi normal, maka uji hipotesis dilakukan dengan statistik nonparametrik menggunakan uji *Kruskal Wallis*. Untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau ditolak bisa diketahui melalui nilai signifikansinya dengan melihat *p value*.

## ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data primer berupa kuesioner yang disebar di wilayah eks Karesidenan Surakarta serta disebar kepada tiga kelompok *user* laporan keuangan daerah. Kelompok pertama adalah masyarakat yang terdiri dari mahasiswa akuntansi, dosen akuntansi yang mempunyai kompetensi dalam bidang akuntansi sektor publik dan anggota dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan dan terlibat dalam advokasi APBD dan memberikan aspirasi dalam penyusunan arah dan kebijakan APBD. Kelompok kedua adalah legislatif dan badan pengawas yang berada di wilayah eks Karesidenan Surakarta. Anggota DPRD yang dijadikan responden adalah anggota yang berasal dari komisi bidang keuangan atau yang pernah menjadi panitia anggaran. Responden badan pengawas adalah pegawai Badan Pengawas Daerah (Bawasda) yang bertugas sebagai auditor. Kelompok yang terakhir adalah investor. Investor yang dijadikan responden adalah penanam modal dalam negeri (PMDN) dan penanam modal asing (PMA) yang melakukan investasi di daerah Karesidenan Surakarta. Adapun kabupaten/kota yang termasuk wilayah Karesidenan Surakarta adalah Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten.

Penyebaran kuesioner kepada responden yang berasal dari kelompok masyarakat, yaitu mahasiswa akuntansi, dosen akuntansi dan anggota lembaga swadaya masyarakat hanya dilakukan di wilayah kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Klaten. Hal tersebut dikarenakan di wilayah Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Boyolali tidak terdapat perguruan tinggi yang mengajarkan mata kuliah akuntansi sektor publik, sehingga syarat *purposive sampling* tidak terpenuhi.

Wilayah penyebaran kuesioner yang berasal dari kelompok legislatif dan badan pengawas juga tidak dapat mencakup semua daerah eks Karesidenan Surakarta. Hal tersebut dikarenakan pada kelompok badan pengawas, Bawasda Kabupaten Wonogiri menolak penelitian di wilayahnya dengan alasan independensi. Untuk kelompok legislatif, penelitian hanya dapat dilakukan di wilayah Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Boyolali. Hal yang menghambat penelitian adalah alasan birokrasi dan teknis.



Wilayah penyebaran kuesioner untuk kelompok investor dapat melingkupi semua investor yang berinvestasi di wilayah eks Karisidenan Surakarta. Terdapat beberapa responden PMA yang mempunyai kantor pusat di luar wilayah eks Karesidenan Surakarta, seperti di Semarang dan Surabaya, namun unit usaha beroprasional di wilayah Karisidenan Surakarta.

Sebelum menyebar ke responden yang telah ditentukan, peneliti terlebih dahulu menyampaikan surat izin penelitian yang telah disahkan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS kepada responden. Peneliti juga menyampaikan surat pengantar yang berisi permohonan kesediaan responden untuk mengisi kuesioner.

Penyebaran kuesioner kepada mahasiswa akuntansi dan dosen akuntansi dilakukan lewat Himpunan Mahasiswa dan Ketua Jurusan Akuntansi yang ada di universitas responden, sedangkan penyebaran kuesioner kepada anggota Lembaga Swadaya Masyarakat dilakukan langsung dengan memberikan kuesioner kepada responden yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan agar tingkat pengembalian kuesioner tinggi. Kuesioner yang disebarakan kepada kelompok masyarakat seluruhnya berjumlah 215 kuesioner. Kuesioner yang kembali dan dapat diolah adalah 141 buah.

Sebelum peneliti menyebarkan kuesioner kepada responden kelompok legislatif, badan pengawas dan investor, peneliti terlebih dahulu menyampaikan surat izin penelitian yang telah disahkan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret kepada Kepala Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (KESBANGLINMAS) di lingkungan pemerintah daerah dari setiap kabupaten/kota se-eks Karesidenan Surakarta. Selanjutnya, surat izin diteruskan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di setiap kabupaten/kota se-Eks Karesidenan Surakarta.

Setelah mendapat surat pengantar dari KESBANGLINMAS dan BAPPEDA, penyebaran kuesioner kepada kelompok legislatif dan badan pengawas juga dilakukan setelah peneliti mendapatkan izin dari Kepala Badan Pengawas Daerah dan Ketua DPRD di setiap wilayah penelitian. Peneliti kemudian menitipkan kuesioner ke koordinator di kantor Bawasda dan koordinator tersebut memberikan kuesioner kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian, sedangkan untuk anggota DPRD kuesioner disebarakan secara langsung ke responden dan tidak langsung (dititipkan ke sekretaris dewan). Keseluruhan jumlah kuesioner yang disebarakan kepada kelompok legislatif dan badan pengawas adalah 150 kuesioner. Sedangkan kuesioner yang kembali berjumlah 109 kuesioner, dan semua kuesioner yang kembali tersebut dapat diolah lebih lanjut.

Penyebaran kepada responden investor dilakukan dengan mengirimkan kuesioner melalui pos. Hal tersebut dilakukan karena ada beberapa investor yang berdomisili di luar wilayah Karesidenan Surakarta. Jumlah keseluruhan kuesioner yang dikirimkan kepada kelompok investor adalah 107 buah dan kuesioner yang kembali sebanyak 31 buah.

## 2. Data Demografi Responden

Data demografi menyajikan beberapa informasi umum mengenai kondisi responden yang terdiri dari tiga kelompok pengguna laporan keuangan daerah yaitu masyarakat, legislatif dan badan pengawas, serta investor. Domisili semua pengguna laporan keuangan daerah tersebut adalah wilayah eks Karesidenan Surakarta. Kelompok masyarakat diwakili oleh mahasiswa akuntansi yang sedang atau telah menempuh mata kuliah akuntansi sektor publik, dosen akuntansi yang berkompeten di bidang akuntansi sektor publik serta anggota Lembaga Swadaya Masyarakat yang terlibat dalam advokasi APBD dan memberikan aspirasi dalam penyusunan arah dan kebijakan APBD. Kelompok kedua adalah anggota DPRD yang duduk di komisi keuangan atau yang pernah menjadi panitia anggaran dan anggota badan pengawas daerah. Kelompok ketiga adalah investor sebagai pihak yang bekerjasama dengan pemerintah daerah.

Pada tabel berikut disajikan data mengenai kabupaten/kota asal responden, jenis kelamin, strata pendidikan terakhir dan latar belakang pendidikan. Hasil pengolahan data tentang demografi responden adalah sebagai berikut:

### a. Kabupaten/Kota

Tabel 1.  
Kabupaten/Kota Asal Responden

Kabupaten/Kota	Masyarakat		Legislatif dan Badan Pengawas		Investor	
	Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
Sukoharjo	33	23,40%	11	10,09%	5	16,13%
Surakarta	63	44,68%	24	22,02%	4	12,72%
Karanganyar	26	18,43%	23	21,10%	5	16,13%
Klaten	19	13,47%	10	9,17%	5	16,13%
Boyolali	-	-	23	21,10%	3	9,77%
Sragen	-	-	18	16,51%	6	19,35%
Wonogiri	-	-	-	-	3	9,77%
<b>Total</b>	<b>141</b>	<b>100%</b>	<b>109</b>	<b>100%</b>	<b>31</b>	<b>100%</b>

### b. Jenis Kelamin

Tabel 2.  
Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Masyarakat		Legislatif dan Badan Pengawas		Investor	
	Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
Laki-laki	61	43,27%	76	69,72%	23	74,19%
Perempuan	80	56,73%	33	30,28%	8	25,81%
<b>Total</b>	<b>141</b>	<b>100.0%</b>	<b>109</b>	<b>100.0%</b>	<b>31</b>	<b>100.0%</b>

### c. Strata Pendidikan Terakhir

Tabel 3.  
Strata Pendidikan Terakhir Responden

Strata Pendidikan	Masyarakat		Legislatif dan Badan Pengawas		Investor	
	Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
SMU/SMK/SLTA	99	70,21%	9	8,26%	-	-
Diploma 3 (D3)	3	2,13%	9	8,26%	3	9,77%
Strata 1 (S1)	24	17,02%	71	65,14%	26	83,87%
Strata 2 (S2)	14	9,93%	20	18,35%	2	6,36%
Strata 3 (S3)	1	0,71%	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>141</b>	<b>100%</b>	<b>109</b>	<b>100%</b>	<b>31</b>	<b>100%</b>

### d. Latar Belakang Pendidikan

Tabel 4.  
Latar Belakang Pendidikan

Latar Belakang Pendidikan	Masyarakat		Legislatif dan Badan Pengawas		Investor	
	Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
Akuntansi	120	85,11%	9	8,26%	11	35,48%
Hukum	1	0,71%	19	17,43%	3	9,77%
Manajemen	2	1,42%	31	28,44%	5	16,13%
Teknik	2	1,42%	11	10,09%	7	22,58%
Sosial Politik	12	8,51%	21	19,27%	3	9,77%
Lainnya	4	2,83%	18	16,51%	2	6,27%
<b>Total</b>	<b>141</b>	<b>100%</b>	<b>109</b>	<b>100%</b>	<b>31</b>	<b>100%</b>

## 3. Analisis Data

### a. Pengujian Kualitas Data

Sebelum data diolah untuk menguji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian instrumen dengan uji validitas dan reliabilitas guna melihat apakah data yang diperoleh dari responden dapat menggambarkan secara tepat konsep yang diuji.

#### 1) Uji Validitas

Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan metode *Pearson's Correlation Product Moment* dengan bantuan program SPSS 15. Suatu alat uji dinyatakan valid jika nilai probabilitas < 0,05 (level signifikansi 5%).

Dari hasil uji validitas terhadap 35 item pernyataan pada keempat variabel penelitian dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan, kecuali item

pernyataan nomor empat laporan realisasi anggaran dan item pernyataan nomor dua mengenai neraca, dapat dipergunakan dalam pengujian selanjutnya.

## 2) Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik dari *Cronbach* yakni *Cronbach's alpha*. Dari hasil analisis diperoleh koefisien *Cronbach Alpha* sebesar 0,776 untuk pernyataan seputar laporan realisasi anggaran, 0,847 untuk neraca, 0,644 untuk laporan arus kas dan 0,833 untuk catatan atas laporan keuangan. Keempat koefisien tersebut termasuk kategori reliabel jika berdasar pada ukuran yang diterapkan Nunnaly (1967).

## 3) Uji Normalitas

Uji normalitas yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu uji *Kolmogorov-Smirnov*. Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan signifikansi hasil pengujian dengan tingkat signifikansi dari uji normalitas ini haruslah sebesar 0,05. Artinya jika nilai  $Sig_{hit} > 0,05$  maka distribusi adalah normal (asimetris).

Tabel 5.  
Hasil Uji Normalitas

Variabel	Asymp.Sig (2 Tailed)	Status
Laporan realisasi anggaran	0,014	Tidak Normal
Neraca	0,000	Tidak Normal
Laporan arus kas	0,000	Tidak Normal
Catatan atas laporan keuangan	0,004	Tidak Normal

Sumber: Data Output SPSS diolah.

Dari hasil pengujian normalitas pada tabel 5 di atas menunjukkan bahwa nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* untuk variabel laporan realisasi anggaran adalah 0,014, variabel neraca sebesar 0,000; variabel laporan arus kas sebesar 0,000; dan variabel catatan atas laporan keuangan 0,004 (kurang dari 0,05) sehingga untuk keempat variabel tersebut data terdistribusi tidak normal.

## b. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini berusaha untuk menguji apakah ada perbedaan persepsi antara user laporan keuangan pemerintah daerah. User laporan keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini dibagi dalam tiga kelompok. Kelompok pertama adalah masyarakat yang terdiri dari mahasiswa akuntansi, dosen akuntansi, dan lembaga swadaya masyarakat. Kelompok kedua terdiri dari badan pengawas dan DPRD, sedangkan kelompok ketiga adalah investor.

### 1) Pengujian Hipotesis Mengenai Konsep Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan uji normalitas yang telah dilakukan terhadap data yang berkaitan dengan laporan realisasi anggaran, ternyata data terdistribusi tidak

normal. Maka, pengujian hipotesis menggunakan uji statistik nonparametik, yaitu dengan menggunakan uji *Kruskal Wallis*.

Hasil uji secara keseluruhan terhadap pernyataan mengenai konsep realisasi anggaran menunjukkan hasil signifikansi 0,000, lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi di antara masyarakat, DPRD dan Badan Pengawas, serta investor terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya mengenai konsep laporan realisasi anggaran. Dari ketiga kelompok *user* laporan keuangan pemerintah daerah tersebut, Badan Pengawas Daerah dan DPRD memberikan penilaian yang tertinggi.

#### 2) Pengujian Hipotesis Mengenai Konsep Neraca

Pengujian hipotesis mengenai konsep neraca sebagai salah satu komponen laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan statistik nonparametik. Hal ini disebabkan pada saat pengujian normalitas, data terdistribusi tidak normal. Alat uji yang digunakan adalah *Kruskal Wallis*.

Dari hasil uji *Kruskal Wallis* terhadap seluruh pernyataan yang berkaitan dengan konsep neraca sebagai komponen laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,00. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan persepsi di antara para *user* laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya komponen neraca. Di antara ketiga kelompok *user* laporan keuangan pemerintah daerah tersebut, kelompok investor cenderung tidak setuju terhadap pernyataan-pernyataan seputar konsep neraca yang diajukan oleh peneliti (*mean* 18,13).

#### 3) Pengujian Hipotesis Mengenai Konsep Laporan Arus Kas

Pengujian selanjutnya berusaha untuk menguji apakah ada perbedaan persepsi di antara *user* laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya mengenai laporan arus kas. Pengujian hipotesis mengenai konsep laporan arus kas menggunakan statistik nonparametik. Hal ini disebabkan pada saat pengujian normalitas, data terdistribusi tidak normal. Alat uji yang digunakan adalah *Kruskal Wallis*.

Dari hasil uji *Kruskal Wallis* terhadap seluruh pernyataan yang berkaitan dengan konsep laporan arus kas sebagai komponen laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,000. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan persepsi di antara para *user* laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya komponen laporan arus kas. Di antara ketiga kelompok *user* laporan keuangan pemerintah daerah tersebut, kelompok investor cenderung tidak setuju terhadap pernyataan-pernyataan seputar konsep laporan arus kas yang diajukan oleh peneliti (*mean* 18,29).

#### 4) Pengujian Hipotesis Mengenai Catatan atas Laporan Keuangan

Selanjutnya, akan dilakukan pengujian terhadap komponen catatan atas laporan keuangan sebagai bagian terakhir dari laporan keuangan pemerintah daerah. Pengujian terhadap pernyataan-pernyataan seputar catatan atas laporan

keuangan pemerintah daerah menggunakan pengujian statistik nonparametrik karena data terdistribusi tidak normal. Alat uji yang digunakan adalah *Kruskal Wallis*. Tabel berikut menyajikan hasil pengujian *Kruskal Wallis* terhadap pernyataan-pernyataan seputar catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari hasil uji *Kruskal Wallis* terhadap seluruh pernyataan yang berkaitan dengan konsep catatan atas laporan keuangan sebagai komponen laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,000. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan persepsi di antara para *user* laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya komponen catatan atas laporan keuangan. Di antara ketiga kelompok *user* laporan keuangan pemerintah daerah tersebut, kelompok investor cenderung tidak setuju terhadap pernyataan-pernyataan seputar konsep catatan atas laporan keuangan yang diajukan oleh peneliti (*mean* 21,26). Sementara itu, masyarakat serta Badan Pengawas Daerah dan DPRD cenderung setuju dengan pernyataan-pernyataan tersebut. Penilaian tertinggi diberikan oleh Badan Pengawas dan DPRD, yakni sebesar *mean* (36,08).

#### 4. Pembahasan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan persepsi di antara *user* laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini diterima. Apabila dilihat secara keseluruhan dari nilai *mean* di tiap-tiap komponen laporan keuangan, terlihat bahwa persepsi Badan Pengawas Daerah dan DPRD lebih baik apabila dibandingkan dengan masyarakat dan investor. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa badan pengawas sebagai internal auditor keuangan pemerintah daerah dan DPRD sebagai wakil masyarakat dalam memonitor kinerja pemerintah telah berpengalaman dan mampu memahami laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP dengan lebih baik apabila dibandingkan dengan masyarakat dan investor.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dari ketiga *user* laporan keuangan pemerintah daerah, yakni masyarakat, Badan Pengawas dan DPRD, serta investor, investor memberikan penilaian yang paling rendah di antara ketiga kelompok *user* tersebut. Hal ini berarti persepsi yang diberikan investor terhadap laporan keuangan pemerintah daerah masih cukup rendah. Ketertarikan investor untuk mempelajari dan berusaha memahami laporan keuangan daerah sesuai SAP tidak sebesar Badan Pengawas dan masyarakat. Hal ini dapat disebabkan karena investor lebih tertarik untuk mempelajari dan membaca pos-pos laporan keuangan tertentu yang dapat mempengaruhi investasi mereka.

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai apakah terdapat perbedaan persepsi di antara *user* laporan keuangan pemerintah daerah. *User* laporan keuangan daerah dalam penelitian ini terdiri dari tiga kelompok. Masyarakat sebagai kelompok pertama yang diwakili oleh dosen akuntansi, mahasiswa akuntansi, dan lembaga swadaya masyarakat. Kelompok kedua terdiri dari Badan Pengawas Daerah dan DPRD, sedangkan kelompok ketiga adalah investor. Sampel penelitian ini adalah *user* laporan keuangan pemerintah daerah se-eks Karesidenan Surakarta, meliputi wilayah Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Boyolali dan Klaten. Dengan metode *purposive sampling* yang terdapat dalam teknik *nonprobability sampling*, peneliti berhasil mengumpulkan 281 kuesioner dari total 465 kuesioner yang disebar.

Pengujian kualitas data dilakukan dengan uji *Pearson Corelation* untuk validitas data, *Cronbach-Alpha* untuk reliabilitas data, dan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* untuk normalitas data. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji non parametik, yaitu *Kruskal Wallis* karena dari uji normalitas yang dilakukan data tidak terdistribusi normal, dan untuk menguji beda persepsi di antara ketiga *user* laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil dari penelitian ini adalah menerima hipotesis bahwa terdapat perbedaan persepsi *user* terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa persepsi yang diberikan oleh Badan Pengawas dan DPRD terhadap laporan keuangan pemerintah daerah lebih baik daripada persepsi masyarakat dan investor.

### 2. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain:

- a) Ruang lingkup penelitian ini hanya berada di wilayah eks-Karesidenan Surakarta saja sehingga kurang dapat mewakili persepsi atau tingkat pemahaman terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah diantara masyarakat, Badan Pengawas dan DPRD, serta investor.
- b) Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *nonprobability purposive sampling* sehingga kurang dapat mewakili populasi.
- c) Penelitian ini hanya bersifat komparatif untuk membandingkan persepsi antara masyarakat, Badan Pengawas dan DPRD, serta investor terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Peneliti tidak meneliti apakah strata pendidikan, latar belakang pendidikan, dan jenis kelamin mempengaruhi persepsi responden terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

### 3. Saran

Saran yang peneliti ajukan untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya adalah:

- a) Penelitian selanjutnya dapat memperluas jangkauan pengamatan dari segi wilayah pengamatan untuk mendapatkan sampel yang lebih banyak sehingga penelitian ini dapat digeneralisasikan.
- b) Penggunaan metode pengambilan sampel dengan *nonprobability sampling* memiliki keterbatasan dalam mewakili populasinya, sehingga dalam penelitian selanjutnya dapat dipakai metode *probability sampling*. Hal ini akan menyebabkan kesimpulan yang diambil akan lebih kuat.
- c) Instrumen penelitian ini dapat ditambah, misalnya dengan menguji pengaruh latar belakang pendidikan, strata pendidikan, dan jenis kelamin terhadap persepsi *user* laporan keuangan pemerintah daerah.
- d) Dari hasil penelitian diketahui bahwa persepsi investor terhadap laporan keuangan pemerintah daerah masih rendah sehingga perlu dilakukan evaluasi bersama apakah laporan keuangan benar-benar dijadikan sarana akuntabilitas.

## Daftar Pustaka

- Antaranews. "BPK Temukan Ketidakwajaran Atas 9 Laporan Keuangan Daerah". 10 April 2008.
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kumorotomo, Wahyudi & Erwan Agus Purwanto (eds.), *Anggaran Berbasis Kinerja: Konsep dan Aplikasinya*, MAP Press, Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta, 2005.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Republika, "Ketua BPK: Kinerja Pemda masih Jauh dari Memuaskan". 11 Oktober 2007.
- Robins, P. Stephen. 2006. *Organizational Behavior. Terjemahan Molan Benyamin*. PT. Indeks.
- Sekaran, Uma, 2006. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. Third Edition. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Steccolini, Ileana. 2002. "Local Government Annual Report: an Accountability Medium?" EIASM Conference on Accounting and Auditing in Public Sector Reforms. Dublin.
- Suara Merdeka. "Laporan Keuangan Daerah Harus Dipublikasikan". 14 Desember 2004.
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta:BPFE.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Akuntansi Pengantar Bagian 1 Proses Penciptaan Data Pendekatan Sistem*. Yogyakarta:BPFE.
- Walgito, Bimo.1994. *Psikologi Sosial: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Andi Offset.
- \_\_\_\_\_. 1997. *Psikologi Sosial: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Andi Offset.